

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR: 001.2/OT.00/K.MU/01/2026**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Maluku Utara Nomor: 001.1/OT.00/ADM.MU/01/2026, perihal Permohonan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tanggal 02 Januari 2026

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 2025-2029;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KETUA,**



**Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 001.2/OT.00/K.MU/01/2026**  
**TANGGAL : 02 Januari 2026**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Bawaslu Provinsi Maluku  
Utara yang Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2026**

**A. KETUA**

**I. Tugas**

1. Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap:
  - a. Pelanggaran pemilu;
  - b. Sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - b. Pemuktahiran yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
  - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
  - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS hingga PPK;
  - j. Rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
  - l. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;
  - m. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
  - n. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;
  - o. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

- p. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
  - Putusan DKPP;
  - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - Putusan/keputusan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - Keputusan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - Keputusan Pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
- q. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
- s. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
- t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. Wewenang**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, mediasi, atau mengajudikasi serta memutu penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- g. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS        |                                                                                                                      |             |             |             |             |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Sasaran Strategis</b>                   | Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu |             |             |             |             |               |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.                 |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                      | 78          | 80          | 82          | 85          | Nilai         |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.                                          |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                      | 0           | 75          | 77          | 80          | Nilai         |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1- KP3).                     |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                          | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                      | 0           | 77          | 80          | 83          | Nilai         |
| <b>Penanggungjawab</b>                     | 1. Bagian Pengawasan dan Humas<br>2. Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum            |             |             |             |             |               |
|                                            | Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu                                                                     |             |             |             |             |               |

|                                            |                                                                                                                                              |             |             |             |             |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Sasaran Strategis</b>                   | partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif                                                                   |             |             |             |             |               |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.                                                                    |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 70%         | 75%         | 78%         | 80%         | Persentase    |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.                          |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 70%         | 75%         | 78%         | 80%         | Persentase    |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.                                      |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 70%         | 75%         | 78%         | 80%         | Persentase    |
| <b>Penanggungjawab</b>                     | 1. Bagian Pengawasan dan Humas<br>2. Bagian Administrasi                                                                                     |             |             |             |             |               |
| <b>Sasaran Strategis</b>                   | Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas |             |             |             |             |               |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan                                              |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 5%          | 7%          | 10%         | 15%         | Persentase    |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu.                                             |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 5%          | 7%          | 10%         | 15%         | Persentase    |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Nilai Indeks Sistem Merit                                                                                                                    |             |             |             |             |               |
| <b>Target</b>                              | <b>2025</b>                                                                                                                                  | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Satuan</b> |
|                                            |                                                                                                                                              | 265         | 280         | 295         | 300         | Nilai         |
| <b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> | Nilai Indeks BerAKHLAK                                                                                                                       |             |             |             |             |               |

|                                     |                                                   |      |      |      |      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------------|
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 78   | 80   | 83   | 85   | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks Reformasi Hukum                      |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 78   | 80   | 83   | 85   | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Opini BPK                                         |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |            |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks Pengelolaan Aset                     |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan                |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 95,5 | 96   | 96,5 | 97   | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 91   | 92   | 93   | 94   | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai SAKIP Bawaslu                               |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 70   | 72   | 74   | 76   | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Capaian IKU                                 |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP          |      |      |      |      |            |
| Target                              | 2025                                              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Satuan     |
|                                     |                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

|                                     |                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)                                                                             |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 3,5                | 3,7                | 4                  | 4,2                | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR                                                                                                      |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 3,8                | 4                  | 4,2                | 4,5                | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Survei Penilaian Integritas KPK                                                                                               |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 73,80              | 73,85              | 73,90              | 74                 | Nilai      |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK                                                                             |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 82%                | 85%                | 88%                | 90%                | Persentase |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks SPBE                                                                                                                   |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 3,5<br>Sangat Baik | 0<br>Tidak dinilai | 3,8<br>Sangat Baik | 0<br>Tidak dinilai |            |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Predikat Keterbukaan Informasi Publik                                                                                               |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | Informatif         | Informatif         | Informatif         | Informatif         | Informatif |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |            |
| Target                              | 2025                                                                                                                                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | Satuan     |
|                                     |                                                                                                                                     | 82                 | 85                 | 87                 | 90                 | Nilai      |
| Penanggungjawab                     | 1. Bagian Administrasi<br>2. Bagian Pengawasan dan Humas<br>3. Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum |                    |                    |                    |                    |            |

KETUA,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.